

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran laporan keuangan bagi suatu entitas merupakan hal yang sangat utama dalam menjaga kepercayaan terhadap para penggunanya. Laporan keuangan merupakan jendela utama untuk melihat ke dalam entitas secara detail. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai manfaat ekonomi yang diberikan oleh suatu entitas maupun badan usaha tersebut. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya keseragaman tiap laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan.

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja usaha serta perubahan posisi keuangan. selain itu laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari suatu kinerja. Pedoman penyusunan laporan keuangan berupa standar akuntansi salah satunya yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang kemudian akan diganti dengan Standar Akuntansi keuangan Entitas Privat (SAK EP). Sesuai dengan ruang lingkup SAK Entitas Privat dijelaskan bahwa secara garis besar definisi entitas privat sama dengan ETAP, dalam entitas

privat ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas tidak memiliki akuntabilitas publik yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Adapun alasan Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) meng

anti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan Standar Akuntansi keuangan Entitas Privat (SAK EP) dimana SAK EP akan menjadi pilar laporan keuangan baru untuk melengkapi laporan keuangan yang ada yaitu SAK Umum berbasis IFRS, SAK EMKM dan PSAK Syariah. SAK ETAP sendiri dibuat pada tahun 2011 dengan merujuk pada ED IFRS For SMEs, tapi ternyata versi final dari IFRS For SMEs berbeda cukup signifikan dengan dengan ED IFRS For SMEs maka dilakukan review kembali dan hasil terbaru dari SAK ETAP akan di perbarui dengan SAK EP, dengan tujuan agar para pengambil keputusan dapat dengan mudah memahami laporan keuangan dan tidak perlu meminta laporan khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dengan demikian kualitas laporan keuangan SAK EP dianggap lebih baik dibandingkan SAK ETAP, untuk isi dari SAK EP hampir sama dengan IFRS for SMEs versi tahun 2015.

Perbedaan utama untuk laporan keuangan menurut SAK EP dengan SAK ETAP, pada penerapan SAK EP terdapat laporan keuangan konsolidasi. Entitas yang memiliki investasi pada entitas anak akan menyusun laporan keuangan konsolidasi, investasi pada entitas anak pada laporan keuangan dilakukan konsolidasi dengan laporan induk. Pelaporan untuk laporan keuangan konsolidasi

ini mengikuti ketentuan dalam PSAK 65. suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Rohma, 2020).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi pada 14 februari 2021. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) sebagai solusi untuk perusahaan kecil dan menengah yang sering menemukan kesulitan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang selama ini berlaku. SAK Entitas Privat diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK Entitas Privat merupakan bentuk SAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP yang sebelumnya, SAK Entitas Privat ini adalah sebagai alternatif standar akuntansi keuangan yang boleh diterapkan salah satunya yaitu koperasi.

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama, dengan kata lain koperasi merupakan suatu bentuk usaha dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Koperasi berlandaskan azas kekeluargaan sehingga dalam melakukan kegiatannya, koperasi mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Bagi sebuah koperasi hal yang terpenting adalah usaha untuk meningkatkan efisiensi modal kerja, karena modal kerja adalah modal yang selalu berputar dalam koperasi dan

setiap perputaran akan menghasilkan aliran pendapatan (*current income*) yang dapat berguna bagi koperasi, masalah modal kerja juga erat hubungannya dengan kegiatan operasi sehari-hari. Laporan keuangan koperasi memberikan informasi yang berisikondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi.

Koperasi wajib menyampaikan dan memberikan informasi pada setiap anggotanya mengenai laporan keuangan koperasi yang dibukukan kedalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan atau kemunduran koperasi. Dalam laporan keuangan koperasi tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat diketahui pula kewajiban serta kekayaan bersihnya.

Laporan Keuangan Pengurus Koperasi sangat penting untuk menginformasikan laporan keuangan berupa posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan. Sebelumnya Penyajian laporan keuangan koperasi harus menganut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tetapi kemudian akan digantikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Oleh

karena itu, koperasi yang diwajibkan untuk mulai menggunakan SAK Entitas Privat adalah koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan merupakan koperasi sektor riil.

Fenomena yang terjadi pada koperasi saat ini walaupun pemerintah telah memberikan pedoman bagaimana cara pembuatan laporan keuangan untuk koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 12/PER/M/KUKM/IX/2015 tetapi pada kenyataannya masih banyak koperasi belum siap menerapkan SAK ETAP dan akan lebih diperparah dengan munculnya SAK Entitas Privat sebagai pengantinya. Salah satu alasan SAK ETAP diganti dengan SAK EP karena SAK ETAP dianggap terlalu sederhana untuk digunakan oleh entitas privat, sedangkan SAK EP disusun lebih komprehensif dari SAK ETAP namun lebih sederhana dari SAK Berbasis IFRS. Dengan demikian SAK EP memiliki perbedaan yang signifikan dengan SAK ETAP. Atas perubahan standar tersebut tentunya akan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam menyusun pelaporan keuangan. Selain itu, dalam menyusun pelaporan keuangan pun koperasi akan memerlukan akuntan yang lebih kompeten.

Koperasi harus siap untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK Entitas Privat karena laporan keuangan yang sesuai dengan standar akan lebih dipercayai oleh pengguna laporan keuangan. Alasan utama Jika koperasi membuat laporan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas koperasi dalam masyarakat. Akuntabilitas yang baik akan membawa dampak positif bagi koperasi untuk

memperoleh anggota baru semakin banyak anggota yang dimiliki koperasi, maka semakin banyak modal yang didapat sehingga koperasi dapat berkembang menjadi badan usaha yang memberikan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.

Pusat Koperasi Melati Plaju didirikan sebagai pengelola Pasar Modern Plaju yang disahkan pada tanggal 08 februari 1999 oleh menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan surat keputusan hukum No. 04/KPTS/BH/KWK.6/11/1999 dengan nomor badan hukum 003952/BH/VI. Pada awal berdirinya Pusat Koperasi Melati sebagai pengelola Pasar Modern Plaju merupakan wadah berhimpunnya primer-primer koperasi yang anggotanya guru, karyawan dan masyarakat yang ada disekitar Pasar Modern Plaju dan seiring berjalannya waktu, Pusat Koperasi Melati mengembangkan unit usahanya untuk masyarakat umum yang khususnya dipusatkan hanya pada Pasar Modern Plaju.

Pusat Koperasi Melati Plaju telah berdiri selama 22 tahun maka sudah seharusnya Pusat Koperasi Melati Plaju terbiasa dan siap dengan kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh dewan standar keuangan, terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi oleh Pusat Koperasi Melati Plaju salah satu permasalahan pada koperasi tersebut ialah pada penyusunan laporan keuangan, hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi dan juga adanya perkembangan pada standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku, sehingga koperasi ini harus sesiap mungkin terhadap standar akuntansi yang berlaku. Terlebih tidak adanya badan pengawas yang mengaudit laporan keuangan

di Pusat Koperasi Melati Plaju, sehingga laporan keuangan yang disusun setiap satu periode akuntansi yang dibahas pada saat RAT selalu dianggap benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana kesiapan laporan keuangan pada koperasi tersebut dan apakah sudah siap dengan standar yang mulai akan berlaku yang dalam hal ini adalah standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP), maka penulis mengambil judul Analisis kesiapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Entitas Privat Pada Pusat Koperasi Melati Plaju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesiapan Pusat Koperasi Melati Plaju menghadapi kebijakan SAK Entitas Privat?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini difokuskan hanya sebatas untuk mengetahui kesiapan laporan keuangan Pusat Koperasi Melati Plaju pada periode 2021 dengan SAK Entitas Privat. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan Pusat Koperasi Melati Plaju dengan teori dan peraturan yang ditetapkan dalam SAK Entitas Privat.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan Pusat Koperasi Melati Plaju pada

Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dari Pusat Koperasi Melati Plaju.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan teori di Indonesia, khususnya tentang permasalahan SAK Entitas Privat. Serta menambah pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan SAK Entitas Privat.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Untuk menambah ilmu dan wawasan yang berkaitan dengan SAK Entitas Privat pada Koperasi.
2. Bagi Pusat Koperasi Melati Plaju Penelitian ini diharapkan menjadi masukkan sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen dan bagi bagian keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pada Pusat Koperasi Melati Plaju.
3. Bagi pihak lain Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan referensi bagi peneliti yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian dimasa yang akan datang dengan judul penelitian yang sejenis.